

Kepemimpinan Kerajaan Sultanah dalam Perubahan Sosial di Aceh, 1641-1699

Melinda Rahmawati,^{1*} Desvian Bandarsyah,¹ Sulaeman²

¹ Magister Pendidikan IPS, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Indonesia

² Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Indonesia

Email: melinda@uhamka.ac.id, d.bandarsyah@gmail.com, sulaeman@uhamka.ac.id

*Korespondensi: melinda@uhamka.ac.id

Article History: Received: 05-08-2024, Revised: 03-09-2024, Accepted: 03-09-2024, Published: 06-09-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan memotret perubahan sosial yang hadir pada masa kepemimpinan sultanah sepanjang tahun 1641-1699. Dengan dinobatkannya seorang perempuan sebagai pemimpin sebuah negeri, tentu saja memunculkan gejolak di pelbagai ranah kemasyarakatan. Termasuk mendorong munculnya perubahan sosial yang sistemik dan menyeluruh di tengah masyarakat Aceh hingga saat ini. Kajian ini menggunakan metode kualitatif-eksplanatif dengan pendekatan studi pustaka yang memvisualkan dan memotret faktor penyebab dan bentuk perubahan sosial dalam kepemimpinan sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi beberapa perubahan sosial yang berdampak positif dan mengakar hingga saat ini bagi masyarakat Aceh. Kesetaraan gender dalam pelbagai ranah sosial, terbentuknya Federasi Tiga Sagi (*Aceh Lhee Sagoe*), hingga kesempatan untuk berkontribusi dalam dunia militer membuat para perempuan Aceh sudah semakin mantap dalam melangkah sesuai dengan tuntunan adat dan ajaran agamanya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tampuk kepemimpinan para sultanah tidak hanya sekadar menjadi simbol kesadaran akan setaranya peran laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat. Meskipun pelbagai kebijakan yang ditetapkan tidak sedikit yang menjadi kontroversi dan memunculkan golongan cendekiawan dan bangsawan yang menentang keras. Lebih jauh, perubahan sosial yang ditimbulkan terbukti telah memajukan generasi penerusnya, melindungi segenap masyarakat yang bernaung dibawahnya, dan menjadi warisan budaya yang membumi di tengah masyarakat Aceh.

Kata Kunci:

kepemimpinan Sultanah; nilai kearifan lokal; perubahan sosial

Abstract

This research aims to interpret and photograph the social changes that were present during the sultanate's leadership period throughout 1641-1699. With the crowning of a woman as the leader of a country, of course, turmoil has arisen in various spheres of society. Including encouraging the emergence of systemic and comprehensive social changes in the midst of Acehnese society to date. This study uses a qualitative-explanatory method with a literature study approach that visualizes and photographs the causative factors and forms of social change in the leadership of the sultanate in the Sultanate of Aceh Darussalam. The results of this study show that there have been several social changes that have a positive impact and are rooted to date for the people of Aceh. Gender equality in various social spheres, the formation of the Three Sagi Federation (*Aceh Lhee Sagoe*), and the opportunity to contribute

to the military world have made Acehese women more steadfast in stepping in accordance with the guidance of their customs and religious teachings. The conclusion of this study shows that the leadership of the sultanah is not only a symbol of awareness of the equal roles of men and women in society. Although the various policies set were not a few controversial and gave rise to scholars and nobles who strongly opposed them. Furthermore, the social changes caused have proven to have advanced the next generation, protected all the people under their protection, and become a down-to-earth cultural heritage in the midst of Acehese society.

Keywords:

social change; Sultanah leadership; the value of local wisdom



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Masyarakat modern, khususnya era masyarakat sosial 5.0 tentu saja tidak asing melihat seorang perempuan menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Meskipun keterlibatan perempuan di tengah masyarakat sudah semakin meluas, akan tetapi kepemimpinan patriaki tetap tidak mengalami pergeseran (Rahmawati et al., 2021). Kepemimpinan transformasional hadir menjadi salah satu solusi yang menetralkan di tengah persoalan penentuan dan haluan dalam sebuah organisasi atau lembaga. Kepemimpinan transformasional sendiri mulai diperkenalkan oleh James W. Dowton, kemudian dikembangkan oleh MacGregor pada tahun 1978, menghadirkan sebuah kebaruan dalam pengaturan sebuah kelompok yang dimulai dari atas (pemimpin) dan diikuti oleh bagian bawahnya secara menyeluruh dan senada (anggota).

Peranan kepemimpinan transformasional di masa kini semakin menjadi suatu hal yang penting dibutuhkan oleh para pemimpin sebuah lembaga atau organisasi. Kenyamanan dan kearifan yang dilakukan oleh pemimpin secara natural membuat anggota kelompok merasa hasil kerja keras dan upaya yang dilakukannya lebih dihargai dan diterima dalam sebuah lembaga atau organisasi. Pelbagai bentuk apresiasi terhadap kinerja anggota juga turut mendorong terbentuknya citra karismatik sehingga pemimpin dapat disegani karena faktor kebersahajaannya, bukan karena faktor perasaan takut atau terancam (Izzati & Mulyana, 2020; Komsiyah, 2016). Gaya kepemimpinan patriarki cenderung menumpukan pucuk kepemimpinan harus pada sosok laki-laki yang dianggap memiliki kemampuan berpikir rasional yang cakap dan lebih berdampak panjang. Namun, gaya kepemimpinan tersebut juga tidak luput dari pemberlakuan sistem yang otoriter, kaku, dan rentan terhadap sifat diktatorial yang mengikat. Sehingga, tidak saja para anggota cenderung memiliki ruang terbatas dalam berkreasi dan mengekspresikan diri sebagai upayanya dalam mencapai tujuan bersama.

Secara historis, masyarakat Aceh sudah sangat terbuka dengan gaya kepemimpinan. Khususnya, peran serta perempuan sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat. Dalam sebuah buku yang berjudul “59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu” yang ditulis oleh Ali Hasjmy (Hasjmy, 1977), disebutkan setidaknya terdapat empat perempuan Aceh pernah naik tahta sebagai sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam. Peran dan pengaruh mereka terhadap peradaban dan politik Aceh dapat dikatakan meluas dan mengakar hingga saat ini.

Dilantiknya Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat sebagai pemimpin tertinggi yang memerintah dalam tahun (1641- 1675 M), Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin, yang memerintah dalam tahun (1675-1678.M), Sultanah Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah, yang memerintah dalam tahun (1678-1688 M), dan Sultanah Sri Ratu Kamalat Syah, yang memerintah dalam tahun (1688-1699) telah menghadirkan perubahan sosial yang signifikan, khususnya pada bidang kesetaraan gender dan perekonomian masa itu. Serta, naiknya perempuan sebagai pemimpin juga sesuai dengan ajaran Islam yang menyebutkan bahwa tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali amal ibadahnya. dan Allah Swt. telah menjanjikan hasil kepada setiap hambanya yang berusaha.

Tercatatnya sejarah dari peran dan pengaruh perempuan Aceh dalam perpolitikan kesultanan dan kehidupan sosial-masyarakat Aceh masa itu, telah menjadi potret dari bukti nyata implementasi nilai-nilai ajaran Islam yang menempatkan posisi perempuan secara bijak dan mulia. Catatan sejarah Aceh dari sekitar abad ke-15 M pada masa Kerajaan Samudera Pasai, perempuan sudah mengambil perannya dalam politik negara dengan naiknya Sultanah Nahrishah yang memerintah pada tahun 1406-1428 M. Dengan bukti-bukti historis dan penguatan hukum Islam, memperkuat peran penting dan pengaruh kepemimpinan perempuan di tengah masyarakat Aceh (Purwanti, 2022; Razali et al., 2021). Sebagai kelompok masyarakat yang memegang teguh keyakinan dan ajaran Islam, haluan hidup masyarakat Aceh tentu saja bertumpu ada kaidah fikih yang terlah tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah. Termasuk dalam struktur kenegaraannya, Kesultanan Aceh juga memposisikan para ulama *Qadhi Malikul Adhli* (penasehat). Pada persoalan naiknya Sultanah Safiatuddin sebagai sultanah pertama kali dalam sejarah Kesultanan Aceh, Syekh Abdurrauf As-Singkili memperkuat kedudukan Sultanah Safiatuddin melalui beberapa ketentuan dalam Al-Qur'an yang disusun menjadi serangkaian perangkat hukum dan tatanan hidup dalam kitab "*Mir'atu al Thullab fi Tashili Ma'rifat al Ahkam al Syar'iiyyah li al Malik al Wahhab*" (Mumazziq, 2018).

Hadirnya kita tersebut turut menegaskan peran perempuan sebagai pemimpin dan pengaturan hukum yang menjunjung kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Serta menunjukkan ulama sebagai penasihat sultan yang sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Aceh (Haryanto, 2019). Dengan naiknya Sultanah Safiatuddin sebagai pemimpin tertinggi Kesultanan Aceh Darussalam, secara historis mengulang kembali sejarah naiknya perempuan sebagai pemimpin di tengah masyarakat Aceh. Peran dan pengaruh kepemimpinan di tengah masyarakat Aceh memberi dampak yang signifikan dari mulai segi pendidikan dengan hadirnya lembaga pendidikan (disebut: Dayah), peningkatan ekonomi melalui pajak perdagangan rempah, menetapkan perangkat hukum yang berlaku [hukum fiqih, jual-beli, dan syariat (jinayat)]. Pemerataan peran perempuan di tengah masyarakat Aceh, hingga saat ini menjadi salah satu kearifan lokal masyarakat yang terus berkembang. Termasuk, beberapa perempuan Aceh yang telah tercatat sebagai pahlawan nasional yang turut berperan dalam mempertahankan kemerdekaan daerahnya dari kolonialisme bangsa barat masa itu.

Tujuan dari penelitian ini guna menafsirkan dan memotret perubahan sosial sebagai hasil dari transformasi nilai kearifan lokal dalam kepemimpinan sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam. Peran perempuan di tengah masyarakat bagi masyarakat Aceh masa lalu sudah bukan hal yang tabu. Namun, disaat seorang

perempuan menjadi pemimpin sebuah negeri, persoalan tersebut mulai menemui kendalanya. Dimulai dari perbedaan pandangan diantara para ulama, ketidakpuasan para bangsawan istana (disebut: *uleebalang*), hingga pandangan dari bangsa lain yang saat itu menjalin kerjasama perdagangan rempah dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun, secara nyata kepemimpinan yang dijalankan oleh keempat sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam telah mematahkan semua keraguan tersebut.

Perubahan sosial yang bergulir berdampak luas pada masyarakat dan berhasil menunjukkan kejayaannya dengan beragam kemajuan di pelbagai sektor. Kepemimpinan yang dijalankan oleh Sultanah Safiatuddin, Sultanah Naqiatuddin, Sultanah Zaqiatuddin, dan Sultanah Kamalat Syah pada tahun 1641-1699, telah meninggalkan jejaknya pada pelbagai sektor seperti: pendidikan, sosial-kemasyarakatan, hukum, dan ekonomi (Hasjmy, 1977). Peninggalannya hingga kini masih dijalankan dalam norma hukum adat dalam masyarakat Aceh masa kini. Serta, turut menjadi salah satu nilai kearifan lokal masyarakat Aceh yang sudah lebih dulu menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dari lingkup kecil hingga lingkup besar seperti lingkungan masyarakat.

Penelitian ini terbatas pada kajian ragam perubahan sosial yang terjadi pada masa pemerintahan sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam para rentang tahun 1641-1699. Kepemimpinan Sultanah yang dimulai pada masa Sultanah Safiatuddin tahun 1641 dengan bergelar "*Paduka Sri Sultanah Tajul-'Alam Safiatuddin Syah Johan Berdaulat Zillu'llahi fi'l-'Alam binti al-Marhum Sri Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Syah*", tidak lepas dari problematika kelayakan dan keharusan seorang perempuan menjadi sebuah pemimpin di tengah masyarakat (Maysarah & Nur, 2024). Kenaikannya yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala) dalam kitab "*Mir'atu al Thullab fi Tashili Ma'rifat al Ahkam al Syar'iiyyah li al Malik al Wahhab*", telah membuka pandangan baru berdasarkan pandangan dari para ulama penganut mazhab Imam Syafi'i bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di tengah masyarakat (khususnya pada perkara perempuan berperan sebagai pemimpin) merupakan hal yang diperbolehkan (Basyir, 2019). Seorang perempuan juga memiliki hak yang sama untuk turut serta dalam membangun peradaban dan masyarakat. Sehingga, dapat terlihat pelbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi sebagai hasil dari transformasi kepemimpinan yang dilimpahkan kepada sultanah. Kemudian perubahan sosial tersebut juga menjadi nilai kearifan lokal dari masyarakat Aceh yang sudah mengenal kesetaraan gender serta peran serta perempuan di tengah masyarakat.

Kajian ini juga berangkat dari penelitian dan literasi pendukung sebelumnya yang terkait dengan transformasi nilai kearifan lokal dalam kepemimpinan di Aceh, diantaranya: Aceh: History, Politics, and Culture yang terbit tahun 2010 (Khan et al., 2010); Sovereign Women in A Muslim Kingdom (The Sultanahs of Aceh 1641-1699) ditulis oleh Sher Banu A. L. Khan tahun 2018 (Khan, 2018); penelitian yang ditulis oleh Subkhana Adzim Baqi, dkk yang berjudul "Pola Kepemimpinan Sultanah Aceh dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan 1641-1699 M" tahun 2022 (Subkhana Adzim Baqi et al., 2022); penelitian yang ditulis oleh Noor Hasanah dan Sitti Rahmasari yang berjudul "Women Leadership in The Archipelago: Reality of Empowerment and Struggle of Learning Rights" tahun 2020 (Hasanah & Rahmasari, 2020); dan penelitian yang ditulis oleh Sher Banu A. L. Khan berjudul "Men of Prowess and Women of Piety: A case Study of Aceh Dar al-Salam in The

Seventeenth Century” tahun 2013 (Khan, 2013). Penelitian dan kajian sebelumnya terfokus pada dampak dari kepemimpinan perempuan sebagai simbol kesetaraan gender. Kepemimpinan transformatif yang bergulir dari perpindahan pola dan strategi antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan cenderung tidak banyak terekplorasi. Dapat pula dikatakan dalam pandangan masyarakat awam, kepemimpinan laki-laki tetap lebih baik dan lebih tinggi daripada kepemimpinan perempuan. Sehingga penelitian dan kajian sebelumnya cenderung berkonsentrasi pada penunjukkan hasil atau luaran dari masa kepemimpinan perempuan tersebut. Namun, sejatinya transformasi kepemimpinan dari laki-laki kepada perempuan tidak sederhana dan mudah untuk dijalankan. Gejolak yang ditimbulkan jika tidak memiliki upaya preventif yang adaptif pada setiap kondisi yang dihadapi, berakibat pada terjadinya kudeta untuk menjatuhkan kekuasaan yang berjalan. Serta pengkhianatan yang tidak berkesudahan.

Metode

Dalam menyusun kajian ini, metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif-eksplanatif. Metode kualitatif didukung oleh analisis eksplanatif bertujuan untuk mampu memberikan penafsiran terkait faktor penyebab dari terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena (Purwanto, Erwan Agus., Sulistyastuti, 2017). Analisis eksplanatif tersebut juga turut ditopang oleh pandangan generatif guna memotret secara objektif terkait ragam perubahan sosial yang terjadi pada masa pemerintahan sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam para rentang tahun 1641-1699 yang menjadi salah satu nilai kearifan lokal. Naiknya Sultanah Safiatuddin sebagai sultanah pertama dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam tentu saja tidak lepas dari perselisihan dan ketidakpuasan para bangsawan yang memicu pemberontakan untuk menjatuhkan kekuasaan yang berjalan. Dalam masa kepemimpinan masing-masing sultanah tersebut, perubahan sosial yang digulirkan cukup signifikan dan berdampak luas. Sehingga, penafsiran dan potret dari perlbagai perubahan sosial sebagai hasil dari transformasi nilai kearifan lokal dalam kepemimpinan sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam perlu dihadirkan guna memperkaya pengetahuan, serta memotret perubahan sosial yang terjadi pada masa tersebut sebagai nilai kearifan yang perlu dipertahankan.

Data-data yang dipergunakan dalam kajian ini berupa data sekunder yang bersifat kepustakaan (kajian literatur). Data tersebut berdasarkan referensi dari buku-buku ilmiah yang secara khusus membahas mengenai ragam perubahan sosial yang terjadi pada masa pemerintahan sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam para rentang tahun 1641-1699. Keterangan dalam penelitian ini merujuk pada sebuah buku berjudul “59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu” yang ditulis oleh Ali Hasjmy, serta kajian yang ditulis oleh Sher Banu A.L Khan berjudul “*Sovereign Women in A Muslim Kingdom (The Sultanahs of Aceh 1641-1699)*” tahun 2018. Kemudian, kajian ini juga didukung oleh serangkaian artikel ilmiah yang terpublikasi pada rentan waktu tahun 2019 hingga tahun 2024 untuk menghimpun informasi sekaligus menguatkan paparan yang disajikan. Hadirnya era kepemimpinan Sultanah Safiatuddin hingga Sultanah Zainatuddin yang berlangsung dari tahun 1641-1699. selain menjadi era perubahan kepemimpinan patriaki ke kepemimpinan transformasional dengan motif kesetaraan gender, sekaligus berdampak luas pada masyarakat Aceh hingga saat ini. Kepemimpinan transformasional yang dilakukan

oleh para sultanah meninggalkan jejak peninggalan yang mengakar hingga turut menjadi nilai kearifan lokal masyarakat Aceh hingga saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Kepemimpinan Transformatif Berbasis Nilai Kearifan Lokal

Dalam sistem sosial-kemasyarakatan, kepemimpinan merupakan sebuah proses yang dijalani oleh seorang individu dengan tujuan untuk mempengaruhi individu lain atau kelompok lain. Dalam kajian mengenai teori kepemimpinan, terdapat sebuah teori yang dapat menghadirkan dampak yang sifatnya menyeimbangkan yakni teori kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional hadir sebagai sebuah pendekatan kepemimpinan yang dilakukan melalui upaya dalam perubahan kesadaran dengan menganggap tugas yang diberikan sebagai sebuah amanah, turut membangkitkan semangat dan mengilhami anggota untuk memberikan loyalitasnya dalam mencapai tujuan bersama tanpa paksaan (Nur et al., 2021).

Dalam teori kepemimpinan tersebut, seorang pemimpin sangat didorong dapat menghadirkan warna yang berbeda melalui beragam inovasi, berani untuk menghadirkan sebuah keterbukaan dalam pelbagai hal, memiliki gaya komunikasi yang menjunjung nilai keluhuran, serta dalam setiap keputusannya dihasilkan dari menjunjung nilai kebebasan berpendapat dan musyawarah mufakat (Komsiyah, 2016; Mukhtar et al., 2024). Hadirnya kepemimpinan transformasional di era masyarakat global saat ini turut menghadirkan sumbangsih yang inovatif dan berkelanjutan. Kepemimpinan transformatif menunjukkan identitasnya sebagai sebuah gaya kepemimpinan yang secara utuh menjalankan nilai dan norma budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Nilai dan norma yang menjadi fondasi dalam karakteristik kepemimpinan, turut berdampak mengakar pada evolusi masyarakat melalui pendekatan perilaku pemimpinnya dalam hal mempengaruhi, menginspirasi, dan membimbing anggotanya.

Keberadaan dan perkembangan gaya kepemimpinan transformasional di tengah masyarakat sangat dibutuhkan guna menghadirkan gerak dinamis dan menjaga stabilitas dalam menjalankan sebuah organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional juga mengajarkan tentang cara menyikapi dinamika perubahan sosial masyarakat dengan cara merawat hubungan antara pemimpin dan anggota secara baik (Mahfudh, 2022; Nazula et al., 2024; Tafvelin et al., 2014). Dalam menjalankan kepemimpinan transformasional sendiri, seorang pemimpin diharuskan memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan dan kemajuan organisasi kearah yang lebih baik dan selaras dengan perubahan yang berlangsung. Seiring bergulirnya modernitas di tengah masyarakat, gaya kepemimpinan yang transformasional menjadi semakin dibutuhkan karena adanya beberapa faktor, seperti: gaya kepemimpinan tersebut berjalan dengan mengedepankan tujuan dan visi bersama, secara aktif terlibat dan mengembangkan kemampuan anggota secara individu sebagai bagian dari upaya pemenuhan tujuan bersama, serta mampu beradaptasi dan terus bertumbuh dalam kompetensi untuk menggerakkan organisasi seiring dengan perubahan sosial masyarakat yang berjalan.

Sebagai negara yang terbentuk dari pelbagai macam etnis, Indonesia hadir sebagai sebuah negara yang kaya dengan budaya dan nilai kearifan lokal yang kuat. Kebudayaan dan nilai kearifan lokal tersebut yang hingga kini terus diperkenalkan, dijaga, dan dilestarikan antar generasi. Sebagai bagian dari unsur kebudayaan,

organisasi yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat menjadi salah satu bagian dari sistem sosial kemasyarakatan yang terbentuk, sekaligus menjadikan nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas mereka (Hermawan, 2023). Dinamika peran dari nilai lokal dalam sebuah organisasi tentu saja dipengaruhi oleh pelbagai faktor, seperti: perkembangan agama, identitas budaya, dan lingkungan sosial. Perkembangan agama dan identitas budaya memiliki peran vital dalam pembentukan nilai kearifan lokal dalam organisasi.

Sedangkan lingkungan sosial hadir sebagai pengimplementasian nilai lokal tersebut pada sebuah organisasi. Nilai-nilai lokal yang diadopsi dalam organisasi dapat memiliki implikasi pada kinerja organisasi. Mulai dari nilai yang sudah menjadi sebuah pembiasaan sederhana seperti: kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong tentu saja ketika dikembangkan dan terus ditanamkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi (Hermawan & Sulastri, 2023; Iskandar et al., 2021; Schaubroeck et al., 2016). Seiring dinamika perubahan sosial masyarakat yang semakin mengglobal, tantangan yang dihadapi oleh nilai kearifan Lokal dalam praktik berorganisasi di tengah masyarakat menemui kendala dan memicu asimilasi tersendiri. Tidak sedikit praktik yang dijalankan oleh organisasi modern secara nyata atau laten bertentangan dengan nilai masyarakat lokal yang sudah tertanam lebih dulu. Sehingga masyarakat Indonesia pada masa modernitas saat ini harus mampu memadukan antara praktik berorganisasi yang modern dengan nilai kearifan lokal yang sudah menjadi identitas yang diwariskan antar generasi.

Dengan melekatnya nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam sistem sosial-kemasyarakatan, seorang pemimpin dirasa sangat perlu untuk memahami nilai kearifan lokal yang sudah tertanam dalam organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dapat menghambat perkembangan untuk mencapai tujuan bersama (Ardiyansyah & Pesudo, 2022). Nilai kearifan lokal yang ditanamkan dan diimplementasikan secara utuh secara nyata mendorong hadirnya para pemimpin yang memiliki karakter dan kebijaksanaan yang baik. Sehingga mereka dapat berdiri tidak hanya sekadar memimpin, tetapi dapat menjadi teladan yang bagi anggota dan masyarakat luas. Hal tersebut disebabkan nilai kearifan lokal yang dijalankan dalam organisasi tersebut tercermin dalam tindakan, perkataan, dan pikiran seorang pemimpin yang menuntun kepada kemajuan tanpa melupakan jati dirinya.

Salah satu contoh kepemimpinan transformasional berbasis nilai kearifan lokal dapat ditemukan dalam pengaplikasian nilai dalam *Asta Brata* pada filsafat Jawa oleh masyarakat. Karakter dan peran kepemimpinan dalam *Asta Brata* telah diakui oleh kalangan masyarakat Jawa antar generasi sangat potensial untuk menguatkan dan meneguhkan jati diri sebagai seorang pemimpin (Choirunisa et al., 2021; Sabri et al., 2022). *Asta Brata* sendiri sejatinya berasal dari bahasa Jawa Kuno, yakni: *asta* yang berarti delapan dan *brata* yang berarti tindakan. Sehingga, secara etimologi terlihat bahwa *Asta Brata* memiliki arti delapan tindakan yang menjadi pedoman saat menjadi pemimpin. Baik memimpin diri sendiri, maupun menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Jika dilihat secara filosofis, setiap tindakan dalam *Asta Brata* sendiri disimbolkan melalui elemen-elemen alam, seperti: bumi, air, angin, lautan, bulan, matahari, api, dan bintang. Melalui pemaknaan dari elemen alam tersebut, *Asta Brata* mengilustrasikan sebuah eksistensi pemimpin yang mengandung nilai keadilan, welas asih, berjiwa inspiratif, berpandangan visioner, memiliki ketelitian, mampu bersikap tegas, pemaaf, dan mampu bertanggung jawab atas segala yang

diperbuatnya. Demikian kepemimpinan transformasioanl yang berbasis nilai kearifan lokal dalam *Asta Brata* turut memvisualkan sosok pemimpin yang dinamis dan sedia menaungi seluruh anggotanya tanpa menghadirkan diskriminasi. Serta berkonsekuen dalam melaksanakan hingga merealisasikan secara utuh program yang telah direncanakan, disepakati dan menjadi tujuan bersama.

Karakteristik Kepemimpinan Pada Masa Kesultanan Aceh Darussalam

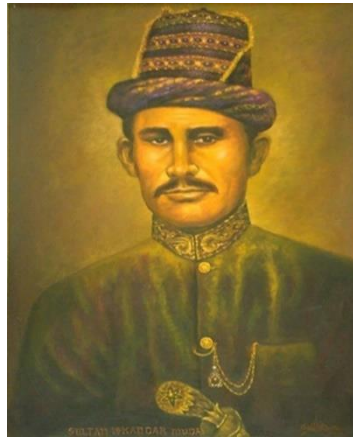
Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri sejak 1496 sebagai hasil unifikasi dari beberapa kerajaan kecil, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi sebuah negeri penghasil lada terbaik dalam perniagaan rempah dunia abad ke-15. Dalam sejarah panjangnya, kepemimpinan dalam Kesultanan Aceh Darussalam memang didominasi oleh laki-laki dan sangat kental dengan nuansa patriarkinya. Sistem patriarki yang begitu kuat melekat dalam kurun beberapa generasi selanjutnya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1638 (Khan et al., 2010; Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA), 2018). Namun pencapaian tersebut belum menjadi akhir kegemilangan sejarah yang ditorehkan oleh kesultanan di ujung Semenanjung Malaka ini. Sejarah sempat mencatat terulang kembalinya kenaikan perempuan sebagai pemimpin di kesultanan tersebut.

Sebelumnya, pada tahun 1428, sejarah telah mencatatkan seorang perempuan yang dinobatkan menjadi sultanah pada masa Kerajaan Samudera Pasai. Kemudian, sejarah yang sifat einmalig kembali menuliskan tentang naiknya seorang perempuan Aceh menjadi pemimpin tertinggi di negeri tersebut (Rahayu, 2024; *Sultanah Malikah Nahrasyiyah*, 2017). Hanya saja, naiknya para sultanah tersebut menjadi sebuah fragmen sejarah yang hingga kini historiografinya nyaris hilang. Kepemimpinan empat sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam yang berlangsung secara berturut-turut dimulai pada tahun 1641-1699, menjadi sebuah fenomena yang sempat memunculkan gejolak perpolitikan di kalangan internal kesultanan (Khan et al., 2010). Gejolak yang muncul berasal dari kaum *wujudiyah* yang secara tegas dan keras menentang sosok perempuan sebagai seorang pemimpin. Pertentangan antara Kesultanan Aceh dengan para penganut paham *wujudiyah* ini sudah ada sejak mangkatnya Syekh Syamsuddin Sumatransy tahun 1630 M dan Syekh Hamzah Fansury 1529 M. Semakin kerasnya penentangan yang dilakukan oleh para penganut paham *wujudiyah*, hingga akhirnya Sultanah Safiatuddin mengambil tindakan tegas dengan melarang adanya paham *wujudiyah* dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Termasuk pelarangan atas kepemilikan dan peredaran buku dan/atau kitab yang berkaitan dengan aliran *wujudiyah* (Hasjmy, 1977).

Namun, melalui segenap nilai lokal seperti: kedalaman ilmu dan pengetahuan, sanggup melaksanakan ijtihad (kesepakatan para ulama terhadap persoalan yang ada di tengah masyarakat tetapi belum dijelaskan rinciannya dalam Al-Qur'an), dapat memimpin dengan menjunjung tinggi keadilan, serta memiliki kesanggupan secara lahir dan batin keempat ratu ini tidak hanya kehadirannya mudah diterima oleh mayoritas para bangsawan kesultanan atau *uleebalang* dan ulama sebagai pemimpin agama. Lebih dari itu, kepemimpinan mereka secara nyata juga mampu menjaga perdamaian dan kesejahteraan dalam Kesultanan Aceh Darussalam pada masa-masa sulit pasca mangkatnya Sultan Iskandar Muda (Hasjmy, 1977).

Kesultanan Aceh Darussalam sudah mencatatkan dirinya mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Dengan pelbagai

kemajuannya seperti: perluasan wilayah yang hampir meliputi seluruh Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaka, kemajuan perekonomian melalui perjanjian dagang rempah dengan Inggris melalui EIC (*East India Company*), hingga persahabatan dengan bangsa Timur Tengah dalam bidang pendidikan dan perdagangan turut memberikan kemakmuran untuk bangsa Aceh sendiri (Lombard, 1986; Nafisah, 2016). Meskipun dalam beberapa catatan para pedagang disebutkan, sultanah mengakui bahwa kepemimpinan yang mereka laksanakan tidak sepenuhnya mengantarkan Kesultanan Aceh ke masa kegemilangannya. Namun mereka berupaya keras agar kedamaian, keadilan, dan kemajuan lain (bidang pendidikan dan perekonomian) tetap berpegang teguh pada peninggalan Sultan Iskandar Muda.



Gambar 1. Lukisan Sultan Iskandar Muda

Sumber: Dokumentasi Universitas Abulyatama (Tiah, 2022), diakses pada 25 Juni 2024

Salah satu tokoh sejarawan Aceh yang terkemuka, yakni Ali Hasjmy dalam bukunya yang berjudul “59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu” (Hasjmy, 1977), menguraikan secara rinci bahwa naiknya perempuan sebagai pemimpin negara pada masa itu didasarkan pada kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal yang menjadi pembeda diantara mereka nilai ketakwaanannya kepada Allah Swt. sesuai yang tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13. Selain itu, terdapat juga pendapat lain bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki sejatinya adalah setara dalam politik.

Pertentangan diantara penganut paham Wujudiyah dan para bangsawan istana yang menentang kepemimpinan perempuan, melawan para pengikut ajaran Syekh Abdurrauf As-Singkili dan Syekh Nuruddin Ar-Raniry yang membenarkan kepemimpinan perempuan, menunjukan fakta penerimaan peran perempuan sebagai pemimpin masih memunculkan pro dan kontra tersendiri (Hasjmy, 1977). Selain ketiadaan batasan yang pasti dalam pengambilan peran oleh perempuan di tengah masyarakat, terdapat beberapa pendapat ahli yang menjadi rujukan seperti: Abdul Kadir Audah yang menyebut, terdapat delapan syarat yang harus dipenuhi untuk seorang khalifah (pemimpin) yakni: beragama Islam, laki-laki, *taklif* (kesanggupan menjalankan amanah seorang pemimpin), memiliki ilmu pengetahuan, mampu memimpin dengan menegakkan keadilan, berkompetensi dalam mengelola sumber daya yang tersedia, kesanggupan, kesehatan dan kesempurnaan anggota badan, serta

berketurunan Quraisy (Maysarah & Nur, 2024). Sedangkan Ibnu Khaldun menyebutkan, terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi dalam memilih seorang pemimpin, yakni: ketinggian dan kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki hingga pada tingkat sanggup menetapkan sebuah ijtihad (kesepakatan antara para ulama) terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, mampu menjalankan kepemimpinan dengan berkeadilan, memiliki kompetensi dan kecakapan dalam memimpin, serta memiliki kesehatan (baik indera maupun lainnya) yang baik (Hasjmy, 1977; Safitri & Hasan, 2018).

Kepemimpinan transformatif yang dicontohkan oleh keempat sultanah sepanjang periode tahun 1641-1699, menjadi cermin bagi masyarakat dunia untuk lebih memahami kemampuan dan besarnya pengaruh perempuan di tengah masyarakat, khususnya perempuan Aceh (Khan, 2015b). Fragmen sejarah yang telah tercatat secara eksplanasi dan detail luasnya pengaruh dan besarnya perubahan sosial dalam kepemimpinan perempuan di Aceh. Serta, fragmen sejarah Aceh lainnya yang lebih dulu mencatatkan peranan perempuan dalam politik negara sekitar abad ke 15 M pada masa Kerajaan Islam Samudera Pasai turut memperkuat hipotesis mengenai kepemimpinan transformatif berbasis nilai kearifan lokal di tengah masyarakat Aceh melalui kepemimpinan perempuan tersebut.

Kepemimpinan perempuan pada masa Kesultanan Aceh Darussalam mulai dikuatkan sejak naiknya Sultanah Safiatuddin Tajul Alam dengan gelar "*Paduka Sri Sultanah Tajul-'Alam Safiatuddin Syah Johan Berdaulat Zillu'llahi fi'l-'Alam binti al-Marhum Sri Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Syah*" pada tahun 1641. Kenaikan Sultanah Safiatuddin tidak lepas dari peran seorang *Qadhi Malikul Adhli* (penasehat kerajaan) masa itu yang bernama Syekh Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala). Faktor Syiah Kuala dalam mukadimah kitab "*Mir'atu al Thullab fi Tashili Ma'rifat al Ahkam al Syar'iiyah li al Malik al Wahhab*" secara jelas menyebut, bahwa seorang perempuan mampu menjadi seorang pemimpin selayaknya seorang pria. Serta memiliki hak yang sama untuk terpilih dan dipilih sebagai seorang pemimpin. Termasuk mengambil peran sebagai pemimpin sebuah negeri (Purwanti, 2022; Razali et al., 2021).

Sepanjang Syiah Kuala menjalankan tugasnya sebagai *Qadhi Malikul Adhli*, kitab tersebut juga yang menjadi rujukan atas segala perkara yang terjadi pada masa kesultanan tersebut. Kitab *Mir'atul Thullab* menghadirkan perubahan yang signifikan bagi masyarakat Aceh, khususnya pada beberapa pembahasan (Mumazziq, 2018). Bab yang menghadirkan perubahan signifikan tersebut, antara lain: hukum fiqih, baik persoalan muamalah (perdata), pernikahan beserta dinamika permasalahan keluarga [termasuk didalamnya yang berhubungan dengan hukum waris (faraidh: pembagian harta pusaka)], hukum tata negara beserta pemanfaatan segala hasil bumi didalamnya, hukum *ba'i* (praktik jual-beli beserta ketentuan terkait laba dan bunga dalam pelbagai aktivitas perniagaan), serta hukum jinayah (hukum yang berdasarkan pada syariat Islam beserta dinamika persoalan perdata, tindak kriminal, dan permasalahan kontemporer di tengah masyarakat). Sehingga kitab ini dalam perjalanannya, menjadi kuat setelah dikukuhkan sebagai dasar hukum negara yang turut bernaung dalam Qanun Meukuta Alam.



Gambar 2. Lukisan Syekh Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala)

Sumber: aceh.tribunnews.com (Ramdan, 2014), diakses pada 25 Juni 2024

Meskipun kepemimpinan perempuan masih menjadi sebuah fenomena yang tidak lazim di beberapa negara yang berlandaskan hukum Islam, akan tetapi kepemimpinan perempuan yang telah dilakukan keempat sultanah tersebut telah membuktikan bahwa perempuan juga memiliki kompetensi dalam menjalankan kepemimpinan yang transformatif (Safitri & Hasan, 2018). Menjelang naiknya Sultanah Safiatuddin selaku putri dari Sultan Iskandar Muda, suhu perpolitikan di dalam istana mulai memanaskan. Para ulama dan bangsawan masa itu yang masih menganut paham *wujudiyah* yang disampaikan oleh Nuruddin Ar-Raniry, tidak seluruhnya bersepakat terkait peran perempuan sebagai seorang pemimpin. Sehingga, untuk meredakan suasana tersebut, Syiah Kuala diminta langsung oleh Putri Safiatuddin untuk menyiapkan sebuah dasar hukum terkait kesetaraan peran perempuan di tengah masyarakat. Termasuk substansi dan urgensi dari kepemimpinan perempuan (Khan, 2011, 2013).

Ketika Sultanah Safiatuddin naik tahta, semua prasangka mengenai kurang kompetensinya seorang perempuan dalam menjalankan pemerintahan berhasil disangkalnya dengan sederet kemajuan awal. Kepemimpinan transformatif yang dijalankan oleh Sultanah Safiatuddin dan tiga sultanah setelahnya membuktikan bahwa roda pemerintahan yang dijalkannya terbukti tetap mampu menghadirkan sebuah tatanan negara yang aman bagi perdagangan internasional, keadilan dan perdamaian dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara, serta mempertahankan kemerdekaan negerinya sebagai kesultanan yang berdaulat di tengah perluasan pengaruh perdagangan bangsa Eropa sekaligus upaya kolonisasi atas wilayah perdagangan di Asia Tenggara (Khan, 2015a). Sejumlah catatan laporan dari para pedagang Eropa menyebutkan, para ulama, pejabat VOC (Perusahaan Hindia Belanda), dan EIC (Perusahaan Hindia Inggris) di Aceh pada masa pemerintahan sultanah cenderung memberikan kesan baik terhadap kepemimpinan perempuan yang berlangsung saat itu (Khan, 2015b). Perubahan sosial yang muncul dan mengiringi jalannya pemerintahan sultanah tersebut menyuratkan bahwa kehadiran sultanah sebagai pemimpin tidak menjadi “boneka” yang dibatasi oleh kewajiban terhadap kaum bangsawan. Justru berlaku sebaliknya, pemerintahan sultanah berperan vital untuk mencegah kecemburuan dan

perpecahan di kalangan bangsawa. Serta menunjukkan secara nyata kompetensi perempuan dalam transformasi kepemimpinan yang berjalan.



(a).

(b).

(c).

(d).

Gambar 3. (a). Lukisan Sultanah Safiatuddin; (b). Lukisan Sultanah Naqiatuddin; (c). Lukisan Sultanah Zaqiatuddin; (d). Lukisan Sultanah Kamalat Syah

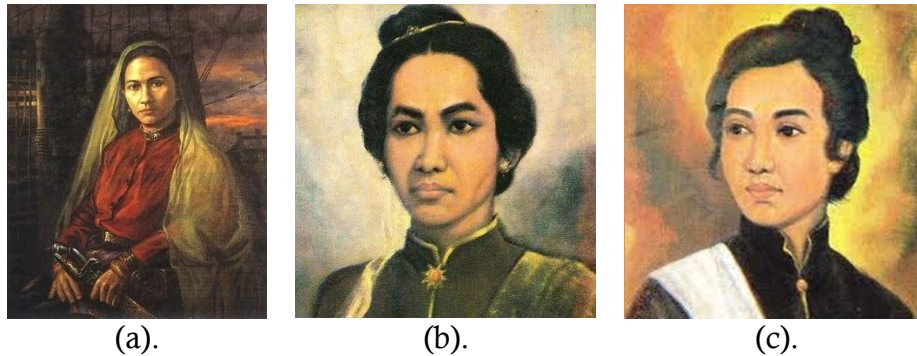
Sumber: tengskuputeh.com (*Misi Mencari Makam Para Sultanah Aceh*, 2017), diakses pada 26 Juni 2024

Dalam kajian mengenai peran dan perubahan sosial yang terjadi sepanjang masa pemerintahan sultanah di Aceh tahun 1641-1659 oleh Sher Banu A.L. Khan, terlihat bahwa pemerintahan perempuan yang berlangsung pada masa tersebut telah berjalan dengan kolaboratif (Khan, 2015b). Upaya tersebut dilakukan guna menjaga keseimbangan diantara faksi, subjek dalam ketaatan pada perundangan-undangan kesultanan, dan hubungan struktural antar pejabat istana. Pemerintahan Sultanah Safiaruddin berjalan dengan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat kerajaan.

Beberapa catatan lain menuliskan, pemerintahan sultanah di Aceh dinilai menjadi sebuah bentuk pemerintahan yang baik dan menakjubkan. Peterwakilan perempuan dalam menjalankan roda pemerintahan sangat terlihat dari sebagian lembaga istana yang di pimpin oleh perempuan. Mulai dari lembaga yang berjalan secara diplomasi dan legislatif maupun yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan (Khan, 2018). Bahkan jika menilik pada masa-masa sebelum pemerintahan Sultan Iskandar Muda, peran perempuan di dalam lingkungan istana sudah ada pada abad ke-16 dan abad ke-17. Pada masa tersebut, perempuan bangsawan yang terpelajar telah mengambil tempat di istana sebagai utusan, penasihat, dan penjaga.

Termasuk penasihat utama dari Sultan Alauddin Riayat Shah al-Mukammil yang memerintah pada tahun 1589-1604 nyatanya adalah seorang perempuan. Hingga memasuki masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda juga terus melestarikan tradisi pemerataan peran perempuan dalam kehidupan istana (Khairunnas et al., 2022). Berdasarkan catatan-catatan yang dituliskan oleh para pedagang yang melakukan aktivitas perniagaan pada masa kepemimpinan sultanah tersebut, dapat terlihat bahwa roda kepemimpinan yang berjalan dapat dikatakan tergolong kepemimpinan yang efektif (*effective leadership*) (Khan et al., 2010). Hal tersebut didasarkan pada efektivitas dan luasnya pengaruh sultanah dalam menjalankan kekuasaannya. Sehingga mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama. Serta, terlihat adanya keterikatan secara fundamental antara budaya masyarakat dengan model kepemimpinan yang berlaku di masyarakat Aceh, Nilai kearifan lokal yang turut diberlakukan dalam sistem

kepemimpinan secara eksplisit menyempurnakan unsur kebudayaan masyarakat Aceh. Melalui kepemimpinan Sultanah Safiatuddin dalam Kesultanan Aceh Darussalam, dengan sendirinya tidak hanya mengulang kembali sejarah kepemimpinan perempuan sebagai bentuk kepemimpinan transformatif berlandaskan nilai kearifan lokal masyarakat Aceh. Namun membuktikan bahwa masyarakat Aceh dari generasi ke generasi telah membuktikan besarnya kompetensi perempuan dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin. Baik pemimpin pemerintahan, maupun pemimpin pasukan perang yang andal dan tidak mudah ditaklukan.



Gambar 4. (a). Lukisan Laksamana Keumalahayati; (b). Lukisan Cut Nyak Dhien; (c). Lukisan Cut Nyak Meutia

Sumber: (a). detik.com (Rosa, 2023); (b). medcom.id (Fatmawati, 2023); (c). biografi.kamikamu.co.id (Cut Nyak Meutia-Pejuang Wanita Aceh Yang Tak Pernah Menyerah, 2023), diakses pada 24 dan 25 Juni 2024

Meskipun Aceh dikenal sebagai daerah yang menganut sistem patriarki dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Islam, tetapi masyarakat Aceh secara nyata dan aktif dalam budaya lokalnya memberikan ruang untuk perempuan ikut serta memberi pengaruh di tengah masyarakat (Khan, 2016). Dalam lintas sejarahnya, para perempuan Aceh telah mengambil peran vital yang memberi pengaruh besar bagi masyarakat dan generasi penerusnya, diantaranya: kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin negara, peran dan pengaruh perempuan sebagai pemimpin perang gerilya dalam peperangan melawan kolonialisme Barat, serta ketangguhan perempuan dalam bidang militer lainnya yang sudah lebih dulu diakui oleh bangsa asing. Serta dapat dipercayai untuk menduduki beberapa jabatan strategis dalam pemerintahan kesultanan.

Berdasarkan kegemilangan yang sudah tercatat dalam sejarah tersebut, terbukti bahwa nilai kearifan lokal masyarakat Aceh telah membuka ruang untuk peran perempuan yang turut menghadirkan perubahan sosial positif dalam hal kesetaraan gender (Ikhwan, Muhammad., Purnomo, Budi., Wahyuni, 2022; Khairunnas et al., 2022). Seperti yang sudah dituliskan dalam sejarah, masa pemerintahan Sultan Alaidin Ali Mughaiyat Syah hingga Sultanah Safiatuddin menjadi masa keemasan dari peradaban masyarakat Aceh. Bahkan, segenap perubahan sosial yang menjadi kegemilangan dalam pemerintahan Sultanah Safiatuddin turut diabadikan dalam kitab *Bustanus Salat* sebagai berikut:

“Bahwa Adalah Bagi Duli Hadharat Tuan Kita Seri Sultan Tajul Alam Safiatuddin Syah Berdaulat Zil Allah Fil-Alam itu beberapa sifat yang kepujian

dan perangai yang kebajikan, lagi takut akan Allah senantiasa dengan membaca kitab Allah dan menyuruhkan orang berbuat kebajikan-kebajikan dan melarang orang berbuat kejahatan...”.

Perubahan sosial yang bergulir tidak saja menjadi bukti bahwa kepemimpinan transformatif yang dilaksanakan pada masa Kesultanan Aceh berdampak positif dan dapat tetap selaras dengan nilai kearifan lokal masyarakatnya. Namun turut memberikan kesadaran bahwa perubahan sosial akan sangat berdampak dan mengakar melalui pembaruan dalam bidang pendidikan, serta didukung oleh upaya untuk membangun kesadaran tentang pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Perubahan Sosial Sepanjang Kepemimpinan Sultanah di Aceh Tahun 1641-1699

Secara jelas terlihat dari fragmen sejarah pemerintahan era sultanah di Aceh, masa pemerintahan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin menjadi masa pemerintahan yang pondasi dasar perubahan sosial, khususnya kalangan perempuan dalam Kesultanan Aceh Darussalam (Maysarah & Nur, 2024; Ramadhani & Wijiyanto, 2022). Meskipun roda pemerintahan yang dijalankan merupakan kelanjutan dari pemerintahan Sultan Iskandar Tsani (1636–1641), ditambah dengan menjaga dan merawat peninggalan kegemilangan masa pemerintahan Sultan Agung Iskandar Muda (1607–1636), tidak menghalangi langkahnya untuk melakukan serangkaian perubahan sosial yang dapat mengakar dan menyatu dengan nilai lokal masyarakat Aceh.

Perubahan sosial yang mengakar pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin sejatinya diawali dari aspek pendidikan (Maysarah & Nur, 2024; Ramadhani & Wijiyanto, 2022). Perhatiannya yang begitu besar pada pemajuan dan pembaruan pendidikan melalui beberapa pola baru melalui beberapa upaya transformatif seperti mengangkat guru besar asing untuk menjadi *Qadhi Malikul Adhli* dan Mufti Muaddam, yakni Syekh Nuruddin Ar-Raniry dari Ranir, India. Hingga terciptanya karya-karya ilmiah kelas tinggi yang menjadi rujukan dasar hukum beberapa negara tetangga yang sama-sama menegakkan hukum syariat Islam. Pelbagai karya yang sudah ada dan dikembangkan oleh Nuruddin Ar-Raniry diantaranya tentang tasawuf, filsafat, hukum, sastra dan sebagainya. Melalui pandangan pembaruan yang tertuang, karya-karya peninggalan Nuruddin Ar-Raniry hingga kini masih dipergunakan dalam beberapa kajian terkait. Serta masih menjadi rujukan utama untuk melihat segenap warisan yang ditinggalkan dari masa kesultanan tersebut.

Selain menjadi masa perkembangan ilmu pengetahuan yang paling pesat dalam sejarah panjang kesultanan, masa pemerintahan sultanah di Kesultanan Aceh tetap menjaga nilai tradisi dan warisan kebijakan politik yang sudah digariskan sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (Hasjmy, 1977). Sekalipun terdapat catatan yang menyebut, sultanah mengakui bahwa dalam masa kepemimpinannya tidak sepenuhnya memberikan pengaruh dalam hal politik, ekonomi, dan militer seperti masa kepemimpinan ayahnya. Namun masa kepemimpinannya tetap memberikan pengaruh sosial yang lebih urgensi dan berdampak jangka panjang melalui jalur pendidikan. Masa pemerintahan keempat sultanah telah mengantarkan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan di tingkat Asia Tenggara.

Melalui posisinya sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan, Sultanah Safiatuddin telah mewujudkan tekadnya untuk menghadirkan pembuktian nyata terkait hak dan kewajiban perempuan yang sejatinya setara dengan laki-laki. Tentu saja, kesetaraan yang telah tertuang dalam Al-Qur'an. Kesetaraan gender tersebut berlaku pada segala aspek kehidupan seperti: sosial, ekonomi, bidang politik, dan tetap terdapat pembatasan pada bidang-bidang tertentu sesuai peran kekhususannya (Maddock, 2011; Ramadhani & Wijianto, 2022). Guna mendukung dan memulai gerakan kesetaraan gender tersebut, Sultanah Safiatuddin menetapkan peraturan resmi yang mewajibkan setiap perempuan Aceh masa itu untuk belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki. Melalui kepandaian dan kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki, para perempuan Aceh mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut melaksanakan tugas dalam pelbagai lembaga negara dan badan-badan pemerintahan.

Dengan hadirnya kitab *Mir'atul Thullab*, turut berperan sebagai rujukan utama segala hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin dan ketiga sultanah setelahnya (Mumazziq, 2018). Meskipun pada masa pemerintahan tersebut mengalami ancaman penghianatan dari segelintir kelompok yang tidak puas atas naiknya seorang perempuan sebagai pemimpin tertinggi, serta perluasan kedudukan perusahaan dagang VOC yang semakin merajalela, akan tetapi sultanah melalui kebijakan yang ditetapkan menunjuukan ketangkasannya dan bijaksanaannya dalam mengendalikan roda pemerintahan (Hasjmy, 1977). Perjuangan dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Aceh tetap diupayakan bersama seluruh rakyatnya. Sehingga, kepemimpinan transformatif yang dicontohkan oleh keempat sultanah tersebut menyiratkan beberapa nilai yang dapat diteladani, seperti: sifat anti kolonialisme, memegang teguh ajaran agama Islam, keberanian dan penuh percaya diri, menjunjung tinggi keadilan, mempunyai semangat yang tinggi dan pantang menyerah, mengutamakan kepentingan rakyat, bersikap tegas dalam memimpin negara, serta memiliki kesabaran yang luas.



Gambar 5. Gambar Kitab *Mir'atu al Thullab*

Sumber: Dokumentasi Peneliti, dimiliki sejak November 2021

Pemberian legitimasi terhadap kepemimpinan Sultanah Safiatuddin yang dilakukan oleh Syiah Kuala, menjadi awal titik balik dari menguatnya landasan

kepemimpinan perempuan dalam Kesultanan Aceh Darussalam (Basyir, 2019). Sultanah Safiatuddin sendiri cenderung memilih untuk mempercayakan ulama yang lebih moderat dan dapat menjadi penyeimbang di tengah polemik keagamaan yang dapat suatu waktu berubah menjadi perang saudara. Penunjukkan Syekh Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala) *Qadhi Malikul Adhli* bersama dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniry, menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas politik internal kesultanan.

Syiah Kuala sendiri juga memiliki pelbagai karya yang turut memberikan sumbangsi pada pemajuan keilmuan Islam di Kesultanan Aceh. Beberapa kitab yang ditulis antara lain: Kitab *Umdah al-Muhtajin ila Suluk Maslah al-Mufridin* (tentang tasawuf), Kitab *Tanbih al-Masyi* (tentang tasawuf), Kitab *Mir'atu al-Thullab* (tentang fikih), dan Kitab *Tarjuman al-Mustafid* (tentang tafsir Al-Qur'an) (Basyir, 2019). Meskipun jelas terlihat bahwa karya-karya yang dihasilkan cenderung bersifat menguatkan pemerintahan yang berjalan, akan tetapi pandangan-pandangan mengenai polemik keagamaan yang disampaikan oleh Syiah Kuala tetap terlihat netral dan obyektif berdasarkan rujukan yang jelas dan terpercaya. Melalui karya-karya tersebut juga, Sultanah Safiatuddin berupaya untuk mentuntaskan polemik keagamaan melalui sifat kearifan dan keadilan yang menjunjung netralitas (Irfanullah & Fuad, 2022; Rahmat, 2022).

Dengan kearifan dan keadilannya, kebijakan yang berlaku pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin juga melingkupi pelbagai sektor penting dalam sosial kemasyarakatan, seperti: sektor perpolitikan melalui dirumuskannya kembali Qanun Meukuta Alam atau Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang sebelumnya sudah ada pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (Ramadhani & Wijiyanto, 2022). Selain itu, pada masa tersebut telah mencatatkan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai bagian jalur perniagaan rempah kelas dunia. Sekaligus menjadi daerah transit yang menyambungkan dua pusat kebudayaan besar di Asia, yakni: India dan Cina. Berikutnya pada aspek sosial, Sultanah Safiatuddin telah menghadirkan kebijakan yang mengemansipasi dan melindungi hak-hak perempuan, diantaranya: kebijakan terkait diperbolehkannya perempuan bekerja di lembaga negara dan kebijakan lain yang bersinggungan dengan kesetaraan gender, adanya peraturan penyediaan rumah bagi anak perempuan yang hingga kini masih berlaku dalam tradisi pernikahan dikalangan masyarakat Aceh, Serta pembangunan *Jami''at Bait al-Rahman* sebagai pusat pendidikan tinggi yang terbuka untuk semua kalangan termasuk perempuan.

Dengan berdirinya *Jami''at Bait al-Rahman* sebagai pusat pendidikan tinggi ini yang terbuka untuk semua kalangan, turut mendorong Bandar Aceh Darussalam masa itu sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara, pusat perdagangan strategis, serta pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Motivasi pendirian *Jami''at Bait al-Rahman* juga tidak lepas dari polemik kenaikan perempuan sebagai pemimpin tertinggi di tengah masyarakat (Hasjmy, 1977). Sehingga guna mengecilkan polemik tersebut, Sultanah Safiatuddin menggunakan pendekatan pendidikan sebagai dasar perubahan sosial yang dihadirkan. Kendati penolakan tersebut terus bergulir, Ratu Safiatuddin secara arif dan bijaksana tetap merangkul perbedaan pandangan yang diutarakan para penganut paham *wujudiyah* yang berseberangan tentang diperbolehkan atau tidaknya adanya kepemimpinan perempuan. Sikapnya yang arif tersebut telah

menunjukkan kebebasan dalam berpendapat di tengah masyarakatnya. Bahkan kelompok mereka tetap diperbolehkan untuk mendirikan *dayah* (pesantren) sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran tingkat dasar dan menengah (Baqi, 2020; Rahmat, 2022).

Kepemimpinan Ratu Safiatuddin sejatinya telah melahirkan paradigma baru mengenai kepemimpinan transformatif yang berbasis pada nilai kearifan lokal masyarakat Aceh (Ramadhani & Wijianto, 2022). Kepemimpinan transformatif yang dilakukan tentu saja disertai dengan semangat dalam memimpin, pola kepemimpinan yang kolaboratif, dan komunikasi yang efektif. Segenap peraturan dan kebijakan yang cenderung mengangkat dan melindungi hak kaum perempuan, sejatinya dalam pandangan masyarakat Aceh tidak hanya menciptakan gejolak politik. Namun sejatinya akar dari permasalahannya karena persoalan dalil agamanya. Pada awalnya, masyarakat Aceh beranggapan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin. Alasannya karena bertentangan dengan hukum syariat Islam. Sehingga, kenaikan Sultanah Safiatuddin yang berkarakter kuat memegang teguh syariat Islam, telah membuktikan bahwa hak dan kewajiban perempuan sejatinya sama dengan laki-laki pria baik.

Kesetaraan gender tersebut berlaku pada aspek politik, ekonomi, dan sosial. Serta tetap terdapat pengecualian dalam bidang kekhususan tertentu (Subkhana Adzim Baqi et al., 2022). Melalui peningkatan kualitas pendidikan melalui keterlibatan peran perempuan sebagai sosok yang terpelajar, telah mendorong perubahan sosial yang bergerak secara masif pada pelbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dengan kebebasan perempuan dalam memilih dan menjalankan profesi sesuai minat dan kemampuannya, juga turut menghadirkan sumbangsih besar dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Salah satu profesi yang paling ikonik dari kesetaraan gender di tengah masyarakat Aceh adalah peran perempuan sebagai prajurit perang. Meskipun pada masa sebelumnya, perempuan yang menjadi prajurit perang merupakan mereka yang telah berstatus janda seperti panglima pertama prajurit Keumala Cahaya adalah Laksamana Malahyati. Kemudian pada masa Sultanah Safiatuddin aturan tersebut diperbarui. Ketentuan tersebut menyebutkan, prajurit Keumala Cahaya terdiri dari semua kalangan perempuan. Perlindungan hak perempuan juga diatur dalam perundang-undangan, yakni terkait kedudukan perempuan dalam rumah tangga.



Gambar 6. Contoh aktivitas para santri dayah di sekitar *meunasah* (musala) di Aceh
 Sumber: (Dinas Pendidikan Dayah Akan Perbaharui Data Dayah Banda Aceh, 2021), diakses pada 31 Agustus 2024

Kesetaraan gender yang telah dipionirkan oleh kepemimpinan Sultanah Safiatuddin Tajul Alam telah mengadirkan perubahan sosial yang signifikan di tengah masyarakat Aceh. Setelah Sultanah Safiatuddin Syah mangkat, polemik terkait kepemimpinan perempuan kembali terjadi (Hasjmy, 1977). Sultanah Naqiatuddin yang meneruskan kepemimpinan transformatif tersebut membentuk Federasi Tiga Sagi guna menghalau upaya para anggota kelompok *Wujudiyah* yang semakin keras menentang kepemimpinan perempuan tersebut. Federasi Tiga Sagi (kemudian dikenal sebagai: *Aceh Lhee Sagoe*) yang terdiri dari panglima Sagi memiliki kedudukan dan peran sentral dalam pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Para anggota federasi tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan dan pemberhentian seorang sultan dalam masa pemerintahannya. Setelah mangkatnya Sultanah Naqiatuddin dan dinobatkannya Sultanah Zaqiyatuddin Syah sebagai penerus kelanjutan pemerintahan kesultanan, nyaris tidak menghadapi kendala atau gejolak yang berarti. Gejolak perpolitikan kembali muncul setelah mangkatnya Sultanah Zaqiyatuddin.

Dengan kedamaian dan kestabilan yang sudah berjalan pada masa sebelumnya, masyarakat rakyat Aceh telah menganggap bahwa kepemimpinan Sultanah Zaqiyatuddin sebagai sebuah harapan baru atas perubahan sosial masyarakat masa itu. Sayangnya, pasca naiknya Sultanah Keumalat Syah, gejolak politik kembali terjadi dan semakin menunjukkan perbedaan pendapatnya melalui berbagai propaganda (Hasjmy, 1977). Akhir dari kepemimpinan transformatif melalui kepemimpinan perempuan pada sejarah Kesultanan Aceh Darussalam disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: mangkatnya Syekh Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala) yang saat itu masih memegang jabatan sebagai *Qadhi Malikul Adhli* dan adanya fatwa dari Mekkah atas larangan terhadap kepemimpinan perempuan (Hasjmy, 1977; Maysarah & Nur, 2024). Meskipun telah melemahnya kepemimpinan sultanah dan kepemimpinan Kesultanan Aceh kembali pada sistem patriarki, akan tetapi masa pemerintahan sultanah tersebut telah menghadirkan perubahan sosial yang signifikan dan mengakar. Khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Cukup berbeda dengan pencapaian pada masa kepemimpinan sultan yang cenderung berorientasi pada pengembangan wilayah, ekonomi, dan militer. Sehingga masa kepemimpinan sultanah juga menjadi puncak dari masifnya peran perempuan Aceh di tengah masyarakat.

Perubahan sosial yang muncul melalui kesadaran pentingnya kesetaraan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, telah membuka cara pandang terkait kehidupan yang lebih moderat dan terbuka terhadap perubahan. Kepemimpinan transformatif yang berlangsung pada masa pemerintahan sultanah telah membuka ruang kesetaraan gender yang mengakar menjadi nilai kearifan lokal masyarakat Aceh (Irfanullah & Fuad, 2022). Selain itu, sepanjang 59 tahun masa pemerintahannya, telah mampu menunjukkan performa dalam mempertahankan kemerdekaan dan jaringan perdagangan internasionalnya. Serta memiliki strategi kuat dalam menangkal pengaruh bangsa Barat yang berupa memonopoli dan

melakukan imperialisme di Asia Tenggara (Afriandi & Abdillah, 2023; Hasanah & Rahmasari, 2020). Dalam lintasan sejarah nusantara, perubahan sosial didominasi terjadi karena faktor pendidikan. Saat perempuan mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki, sejak saat itulah masyarakat akan melihat cepatnya perubahan sosial yang terjadi dan bergerak secara masif ke pelbagai segi kehidupan.

Sejarah sudah mencatat beberapa tokoh perempuan yang setelah dirinya mendapatkan hak pendidikan yang setara, mereka menghadirkan perubahan sosial yang berdampak luas (Hikmatiyar et al., 2024). Diantara mereka terdapat Rahmah El-Yunusiyah yang telah berhasil mewujudkan sekolah khusus perempuan di Minangkabau melalui Pesantren Diniyyah Putri Padang Panjang (Dermawan et al., 2024). Kemudian Laksamana Malahayati yang telah mengambil peran sebagai laksamana laut perempuan pertama dan memimpin armada besar dimasanya (Inayatillah, 2023). Selanjutnya keempat sultanah telah yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 59 tahun dengan kehidupan yang moderat (Hasjmy, 1977). Dan para bangsawan perempuan Aceh lainnya yang turut andil menjadi pemimpin perang gerilya selama Perang Aceh dari tahun 1873-1904, menjadi peperangan terpanjang yang dilalui oleh Kolonialisme Belanda di Hindia Timur.

Kesimpulan

Kepemimpinan yang dijalankan oleh para sultanah masa Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1699, menghadirkan perubahan sosial yang mendorong kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Melalui pendidikan, para perempuan memulai perubahan sosial yang meluas dan mengakar. Kesetaraan gender bagi perempuan Aceh menjadi simbol utama kepemimpinan para sultanah. Era kepemimpinan sultanah menjadi simbol kesadaran akan setaranya peran laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, dan bidang lainnya. Lebih jauh, perubahan sosial yang ditimbulkan terbukti telah memajukan generasi penerusnya, melindungi segenap masyarakat yang bernaung dibawahnya, dan menjadi warisan budaya yang membumi di tengah masyarakat Aceh. Meski demikian, kajian ini masih memerlukan telaah lanjutan terkait warisan perubahan sosial pada masa kepemimpinan sultanah tersebut. Baik kajian secara historis maupun secara sosiologi-antropologi. Walaupun kebijakan tersebut telah melekat menjadi warisan budaya masyarakat Aceh melalui hukum adat, akan tetapi keberimbangan peran perempuan di tengah masyarakat Aceh masih belum maksimal.

Referensi

- Afriandi, F., & Abdillah, L. (2023). Pseudo Social Inclusion: The Presence of Women Regional Heads in Aceh. *Proceedings of the 2nd International Conference on Democracy and Social Transformation (ICON-DEMOST 2023)*, 178–182. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-174-6_30
- Ardiyansyah, C., & Pesudo, D. A. A. (2022). Gaya Kepemimpinan, Kearifan Lokal, dan Akuntabilitas BUMDes. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(2), 38–55. <https://doi.org/10.24246/dekat.v1i2.9953>
- Baqi, S. A. (2020). *Empat Sultanah Dalam Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Basyir, D. (2019). *Kemasyhuran Syekh Abdurrauf As-Singkili, Riwayat Hidup, Karya Besar, Kontribusi Intelektual, Pengabdian dan Kepeloporanannya*. Ar-Raniry Press.
- Choirunisa, E. I., Firdausi, K., Hapsari, N. T., & Mardikawati, S. A. (2021). Internalisasi Filsafat Jawa Asta Brata Sebagai Penguatan Karakter Kepemimpinan Guru BK pada Lingkup Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Malang*.
- Cut Nyak Meutia – Pejuang Wanita Aceh yang Tak Pernah Menyerah. (2023). Biografi.Kamikamu.Co.Id. <https://biografi.kamikamu.co.id/cut-nyak-meutia-pejuang-wanita-aceh-yang-tak-pernah-menyerah/>, diakses pada 25 Juni 2024.
- Dermawan, A., Wirman, E. P., & Sarwan. (2024). Gagasan Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah tentang Pendidikan Islam bagi Perempuan. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(6), 123–134. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i6.619>
- Dinas Pendidikan Dayah Akan Perbaharui Data Dayah Banda Aceh. (2021). Diskominfo.Bandaacehkota.Go.Id. <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/08/19/badan-pendidikan-dayah-akan-perbaharui-data-dayah-banda-aceh/>, diakses pada 31 Agustus 2024.
- Fatmawati, F. (2023). *Cut Nyak Dhien Pahlawan Perempuan Heroik, Komando Perang Melawan Kolonialisme Belanda*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/Zkean7Zk-cut-nyak-dhien-pahlawan-perempuan-heroik-komando-perang-melawan-kolonialisme-belanda>, diakses pada 24 Juni 2024.
- Haryanto, T. (2019). Kontruksi Politik Atas Kepemimpinan Wanita : Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17. *Media-Te: Jurnal Studi Islam*, 15(2).
- Hasanah, N., & Rahmasari, S. (2020). Women Leadership in The Archipelago: Reality of Empowerment and Struggle of Learning Rights. *Proceeding of 2nd Seminar International Literature Nusantara (SILiN-2)*.
- Hasjmy, A. (1977). *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu*. Penerbit Bulan Bintang.
- Hermawan, E. (2023). Dinamika Kepemimpinan Dalam Masyarakat Lokal: Menelisik Nilai-Nilai Lokal Sebagai Kunci Sukses Pada Kepemimpinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Panengen: Journal of Indigenous Knowledge*, 2(1).
- Hermawan, E., & Sulastri, R. (2023). Kearifan Lokal Dalam Kepemimpinan: Menjelajahi Perspektif Sosiologis Organisasi Untuk Menjawab Tantangan Global. *Panengen: Journal of Indigenous Knowledge*, 1(4), 2023.
- Hikmatiyar, A., Mu'ammam, M. A., & Arifin, Z. (2024). Hamka's Thoughts on Women's Education: Analysis of Al-Azhar's Interpretation (Surah An-Nisa': 34-35). *Eduvest:Journal of Universal Studies*, 4(7). <http://eduvest.greenvest.co.id>
- Ikhwan, Muhammad., Purnomo, Budi., Wahyuni, A. (2022). *Analisis Karakter Semangat Kebangsaan Cut Nyak Dien Sebagai Tokoh Pelopor Perjuangan Perempuan*. 2(4), 390–397.

- Inayatillah. (2023). Entitas Aceh di Asia Tenggara: Histori dan Refleksi. *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2022)*.
- Irfanullah, G., & Fuad, V. (2022). Jejak Moderasi Beragama di Kesultanan Aceh di Bawah Pemerintahan Sultanah Safiatuddin. *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 10(1).
- Iskandar, Ardyawin, I., Putriana, A., & Nuzula, D. F. (2021). Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Kepemimpinan di Era Digital: Studi Perpustakaan UII dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics*, 3(2). <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/jglp/index>
- Izzati, U. A., & Mulyana, O. P. (2020). Kepemimpinan Transformasional dan Pemberdayaan Psikologis Pada Guru. *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4(1), 57–64. <https://doi.org/10.26539/teraputik.41285>
- Khairunnas, M., Daulay, H., & Saladin, T. I. (2022). Kepemimpinan Perempuan Aceh. *Perspektif*, 11(4), 1559–1568. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7739>
- Khan, S. B. A. L. (2011). The Jewel Affair The Sultanah, Her Orang Kaya and The Dutch Foreign Envoys. In *Mapping the Acehnese Past*. KITLV.
- Khan, S. B. A. L. (2013). Men of Prowess and Women of Piety: A case Study of Aceh Dar al-Salam in The Seventeenth Century. In *Journal of Southeast Asian Studies* (Vol. 44, Issue 2, pp. 204–225). <https://doi.org/10.1017/S0022463413000040>
- Khan, S. B. A. L. (2015a). Response and Resilience: Aceh's Trade in The Seventeenth Century. *Indonesia*, 100, 33–51. <https://doi.org/10.5728/indonesia.100.0033>
- Khan, S. B. A. L. (2015b). Revisiting “Kingship” in Seventeenth Century Aceh: From Ira et Malevolentia to Pax et Custodia. In *Early Modern Southeast Asia* (1st ed.). Routledge.
- Khan, S. B. A. L. (2016). Sultanate of Aceh. *The Encyclopedia of Empire*.
- Khan, S. B. A. L. (2018). *Sovereign Women in A Muslim Kingdom (The Sultanahs of Aceh 1641-1699)*. NUS Press.
- Khan, S. B. A. L., Reid, A., Missbach, A., & Schulze, F. (2010). *Aceh: History, Politics, and Culture*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Komsiyah, I. (2016). Kepemimpinan Transformatif Perkembangan dan Implementasinya Pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ta'allum*, 04(02).
- Lombard, D. (1986). *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Balai Pustaka.
- Maddock, S. (2011). Transformational Public Leadership is Collaborative: Governments and Public Services Have to Change. *Human Resource Management International Digest*, 19(7), 40–41. <https://doi.org/10.1108/09670731111175605>
- Mahfudh. (2022). Konstruksi Kepemimpinan Transformatif di Lembaga Pendidikan Islam. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(2).

- Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA). (2018). *Melintas Jejak Perjalanan Sejarah Aceh*. Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA).
- Maysarah, & Nur, H. B. M. (2024). Kiprah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Dalam Memajukan Pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1).
- Misi Mencari Makam Para Sultanah Aceh. (2017). TengkuPuteh.Com. <https://tengkuPuteh.com/2017/10/06/mencari-makam-para-sultanah-aceh/>
- Muktamar, A., Yassir, B. M., Syam, W. S., & Ningsi, W. (2024). Hubungan Gaya Kepemimpinan dan Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Journal of International Multidisciplinary Research E* (Vol. 2, Issue 1). Halaman. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- Mumazziq, R. (2018). Al-Sinkili dan Mir'at Al-Thullab Sebagai Kitab Yurisprudensi Islam Pertama Karya Ulama Nusantara. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 4(1), 1–15. <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/25>
- Nafisah, C. (2016). *Peran Dan Perjuangan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) Dalam Membangun Kejayaan Kesultanan Aceh*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Nazula, D., Agustin, A., Dyah, D., Anggraeni, A., & Muniroh, A. (2024). Peran Kepemimpinan Transformatif Ki Hajar Dewantara dalam Pengembangan Madrasah Unggul: Sebuah Kajian Literatur. *Excelencia Journal of Islamic Education & Management*, 4(1).
- Nur, L., Ahman, E., Hendrayati, H., & Budiman, A. (2021). Analisis Kepemimpinan Transformasional. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 12(2).
- Purwanti, R. (2022). *Kepemimpinan Wanita Dalam Pandangan Abdurrauf As-Singkili Tafsir Surah An-Naml Ayat 29-35*. Institut PTIQ Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus., Sulistyastuti, D. R. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah – Masalah Sosial* (Edisi Kedu). Penerbit Gava Media.
- Rahayu, R. (2024). *Mengenal Sultanah Nahrisyah, Raja Perempuan Pertama di Aceh*. <https://www.rri.co.id/daerah/780901/mengenal-sultanah-nahrisyah-raja-perempuan-pertama-di-aceh>, diakses pada 1 September 2024.
- Rahmat, M. (2022). Komunikasi Politik Sultanah Safiatuddin Aceh. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 5(2).
- Rahmawati, M., Ruslan, A., & Bandarsyah, D. (2021). The Era of Society 5.0 as the unification of humans and technology: A literature review on materialism and existentialism. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 16(2), 151. <https://doi.org/10.20473/jsd.v16i2.2021.151-162>
- Ramadhani, D., & Wijiyanto, S. T. (2022). Sulthanah Taj'al Alam Safiatuddin Syah: Nilai Inspirasi dan Kontribusi Dalam Memimpin Kesultanan Aceh 1641-1675. *Rinontje: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 3(2).

- Ramdan, A. (2014). *Siapakah Syiah Kuala Itu?*. Aceh.Tribunnews.Com. <https://aceh.tribunnews.com/2014/06/30/siapakah-syiah-kuala-itu>, diakses pada 25 Juni 2024.
- Razali, M., Mansur, M., Hanif, & Al-Fairusy, M. (2021). Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Abdurrauf As-Singkili. *Basha'ir: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir*, 1(2). <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bashair/article/view/867>
- Rosa, N. (2023). *Profil Keumalahayati: Laksamana Perempuan Pertama Dunia-Dikenang UNESCO*. Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7071543/profil-keumalahayati-laksamana-perempuan-pertama-dunia-dikenang-unesco>, diakses pada 24 Juni 2024.
- Sabri, F., Mutiara, D., & Rosmi, F. (2022). Model Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal Melayu Bangka. *Jurnal Perspektif*, 2(1). <https://doi.org/10.53947/perspekt.v2i1.238>
- Safitri, Z., & Hasan, E. (2018). Pemikiran Ali Hasjmy Tentang Konsep Kepemimpinan Politik Perempuan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(1). www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
- Schaubroeck, J. M., Lam, S. S. K., & Peng, A. C. (2016). Can Peers' Ethical and Transformational Leadership Improve Coworkers' Service Quality? A Latent Growth Analysis. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 133, 45–58. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2016.02.002>
- Subkhana Adzim Baqi, Aziz, M., & Windari, S. (2022). Pola Kepemimpinan Sultanah Aceh dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan 1641-1699 M. *Journal of Islamic History*, 2(1), 48–62. <https://doi.org/10.53088/jih.v2i1.211>
- Sultanah Malikah Nahrasyiyah*. (2017). <https://tengkuputeh.com/2017/10/08/sultanah-malikh-nahrasyiyah/>, diakses pada 1 September 2024.
- Tafvelin, S., Hyvönen, U., & Westerberg, K. (2014). Transformational Leadership in The Social Work Context: The Importance of Leader Continuity and Co-Worker Support. *British Journal of Social Work*, 44(4), 886–904. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcs174>
- Tiah, P. (2022). *Gambar Sultan Iskandar Muda*. Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6490441/mengenal-sultan-iskandar-muda-pahlawan-asal-aceh-yang-gigih-melawan-portugis>, diakses pada 25 Juni 2024.